

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya perusahaan adalah suatu badan usaha yang diatur dan dilaksanakan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian dan keterampilan tertentu agar tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai. Beberapa tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh laba maksimal dari hasil operasi, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan menciptakan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Pertumbuhan dan persaingan dunia bisnis sekarang ini memaksa setiap perusahaan untuk menentukan strategi-strategi yang tepat dalam mengelola perusahaannya. Maka perusahaan memerlukan informasi yang tepat untuk antisipasi tersebut, terutama informasi yang bersifat jangka panjang.

Pada perusahaan skala kecil, yang berwenang membuat keputusan dan bertindak sebagai manajernya adalah pemilik perusahaan itu sendiri. Hal ini dikarenakan transaksi yang terjadi belum begitu banyak dan manajer masih dapat mengingat-ingat apa yang terjadi dalam perusahaannya. Dengan berkembangnya perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang besar, maka aktivitas yang dilakukan pun akan semakin kompleks sehingga pengambilan keputusan yang penting bagi perusahaan akan lebih sulit lagi jika dilakukan oleh seseorang individu saja karena begitu area keputusan yang harus diambil dan tidak semua orang memiliki keahlian dalam berbagai bidang organisasi yang komplekstersebut. Oleh karena itu, keputusan tidak lagi dilakukan oleh direktur

utama, melainkan didelegasikan kepadamasing-masing manajer dengan pemberian wewenang akan divisi yang dibawahinya. Selain itu, perkembangan perusahaan menjadi perusahaan berskala besar, pastinya akan menimbulkan pemisah antara pemilik perusahaan dengan manajer perusahaan.

Definisi bank yang dikemukakan sesuai dengan tahap perkembangan bank. Untuk memberikan definisi yang tepat agaknya memerlukan penjabaran, karena definisi tentang bank dapat dilihat dari berbagai sudut pandang.

Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral. (Prof G.M. Velyn Stuart Dalam bukunya Bank Poitic)

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

Dari pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil

diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

Adanya bank tentunya memberikan manfaat bagi banyak pihak, manfaat tersebut antara lain Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (*yield enhancement*), Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (*hedging*), atau disebut juga sebagai *risk management*, Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari (*price discovery*).

Usaha pokok bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, deposito, maupun giro, dan menyalurkan dana simpanan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya. Bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) Maksudnya adalah bank menjadi perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang membutuhkan dana (defisit unit). Bank memiliki fungsi sebagai “Agen Pembangunan” (*Agent of Development*) Sebagai badan usaha, bank tidaklah semata-mata mengejar keuntungan (*profit oriented*), tetapi bank turut bertanggung jawab dalam

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini bank juga memiliki tanggung jawab sosial.

Bank sentral di suatu negara, pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi Bank Sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Dan Bank Sentral bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi. Bank Sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali, dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak maka Bank Sentral dengan menggunakan instrumen antara lain namun tidak terbatas pada *base money*, suku bunga, giro wajib minimum mencoba menyesuaikan jumlah uang beredar sehingga tidak berlebihan dan cukup untuk menggerakkan roda perekonomian.

Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri, Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar di masa mendatang. Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 yang menjelaskan, "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak". Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini, jelas tergambar, karena secara filosofis bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa.

Ada beberapa aturan terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance* yang baik dikeluarkan Bank Indonesia (BI), Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), maupun Keputusan Menteri BUMN. Peraturan Bank Indonesia Nomo 8/14/PBI2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum serta Surat Edaran Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Bank berkewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap aktivitas usahanya pada seluruh tingkatan atau jejaring organisasi. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) juga sudah mengisyaratkan keberadaan komisaris independen dan komite audit bagi semua perusahaan publik. Ditambah lagi, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 117/2002 sudah mengisyaratkan hal yang sama untuk BUMN. Rujukan-rujukan tentang praktik terbaik penerapan manajemen resiko dan komite

audit serta melalui *Indonesia Society of Independent Commissioners (ISICOM)* untuk praktik terbaik fungsi dan peran komisaris independen.

Pada September 2007, Bank Indonesia (BI) melakukan sebuah *Pilot Project Self Assessment* yang merupakan salah satu mekanisme yang diterapkan untuk mengukur tingkat GCG pada 130 bank termasuk kantor cabang asing yang ada di Indonesia.

No	Tahun	Kategori	Jumlah Bank
1	2007	Sangat Baik	12
2	2007	Baik	76
3	2007	Cukup Baik	39
4	2007	Kurang Baik	3

No	Tahun	Kategori	Persentase
1	2007	Belum memiliki komisaris independen	53,5%
2	2007	Belum membentuk komite secara lengkap	30,7%
3	2007	Belum memiliki jumlah komisaris yang lebih besar dari jumlah direksi	18,8%
4	2007	Belum mematuhi ketentuan GCG	69,3%

Lebih lanjut BI menyebutkan 53,5 persen bank di Indonesia belum memiliki Komisari Independen, 30,7 persen bank belum membentuk komite secara lengkap dan 18,8 persen bank belum memiliki jumlah komisaris yang lebih

besar dari jumlah direksi. Dari penelitian Bank Indonesia tersebut menunjukkan bahwa GCG masih sebatas peraturan belum menjadi budaya organisasi, 69,3 persen bank yang beroperasi di Indonesia belum mematuhi ketentuan *Good Corporate Governance* (GCG) (Ghufron dalam Sami"ani 2008:18).

Penerapan untuk tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dapat diartikan sebagai suatu proses yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas laba dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang berlandaskan peraturan undang-undang dan norma yang berlaku. Laba merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja operasional perusahaan. Baik kreditur ataupun investor menggunakan laba untuk mengevaluasi kinerja manajemen, memperkirakan *earning power*, dan untuk memprediksi laba dimasa yang akan datang. *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggung jawabkan diantara elemen dalam perusahaan (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan.

Dalam paradigma ini, Dewan Komisaris berada pada posisi untuk memastikan bahwa manajemen telah benar-benar bekerja demi kepentingan perusahaan sesuai strategi yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para pemegang saham untuk meningkatkan nilai ekonomis perusahaan. Demikian juga komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal ini memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya

menjaga terciptanya system pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance*.

Mengingat bahwa akhir-akhir ini *Corporate governance* merupakan salah satu topik permasalahan sehubungan dengan semakin gencarnya publikasi tentang kecurangan (*fraud*) maupun keterpurukan bisnis yang terjadi akibat kesalahan yang dilakukan oleh para eksekutif manajemen, maka hal ini menimbulkan suatu tanda tanya tentang kecukupan (*adequacy*) *Corporate governance*. Demikian pula halnya tentang kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dipertanyakan. Oleh karena itu adalah suatu hal yang wajar dan penting bagi semua pihak yang terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan untuk mengupayakan mengurangi bahkan menghilangkan krisis kepercayaan (*credibility gap*) dengan mengkaji kembali peranan masing-masing dalam proses penyusunan tersebut.

Corporate governance pada industri perbankan di negara berkembang seperti halnya di Indonesia pada pasca krisis keuangan menjadi semakin penting mengingat beberapa hal. Pertama, bank menduduki posisi dominan dalam sistem ekonomi, khususnya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi (King dan Levine dalam Sami"ani 2008 :18). Kedua, di negara yang ditandai oleh pasar modal yang belum berkembang, bank berperan utama bagi sumber pembiayaan perusahaan. Ketiga, bank merupakan lembaga pokok dalam mobilisasi simpanan nasional.Keempat, liberalisasi sistem perbankan baik melalui privatisasi maupun deregulasi ekonomi menyebabkan manajer bank memilii keleluasaan yang lebih

besar dalam menjalankan operasi bank (Arun, Turner 2003 dalam Supriyatno 2006).

Good Corporate Governance itu sendiri memiliki beberapa aspek penting yang harus diperhitungkan oleh kalangan bisnis. Dan aspek-aspek ini diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan yang menjadi momok dalam perusahaan. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan di antaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya. Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (*insider information for insider trading*).

Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*Principal*) memperkerjakan orang lain (*Agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *Agent* tersebut (Jensen dan Meckling 1976 dalam Sami"ani 2008:19). Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang

dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenai sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymmetric*).

Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitas penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Darmawati, dkk, 2004:3).

Kajian mengenai *Good Corporate Governance* yang meningkat dengan pesat seiring dengan terbukannya skandal keuangan berskala besar seperti skandal Enron, Tyco, Worldcom, Merck, Global Crossing mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornnet, Marcuss, Saunders dan Tehranian dalam Sam^{ani} 2008:14) yang melibatkan akuntan, salah satu elemen penting dalam *Good Corporate Governance*. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti PT. Bank Lippo (Boediono, 2005) juga melibatkan pelaporan keuangan (*financial reporting*) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi (Boediono, 2005). Salah satu penyebab terjadinya kasus-kasus ini adalah karena lemahnya penerapan praktik *Corporate governance* di Indonesia.

Kendala yang dihadapi PT BNI dilaksanakan dengan cukup baik tapi masih ada kendala-kendala yang dihadapi yaitu kendala pengetatan kredit perbankan, produktivitas produk bank yang belum sepenuhnya efisien dan efektif, standar SDM yang tinggi akibat dari era globalisasi dan masalah kasus penyimpangan internal.

Corporate governance sendiri adalah sebuah konsep yang didasarkan pada teori keagenan, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai suatu alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana (*capital*) yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Saputri, 2009).

Corporate governance diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan atau monitoring kinerja manajemen serta menjamin terciptanya akuntabilitas manajemen terhadap Principal berdasarkan peraturan yang ada. Konsep *Corporate governance* ini pada intinya menghendaki adanya transparansi yang lebih baik bagi semua pengguna laporan keuangan yang bila berhasil diterapkan dengan baik secara otomatis akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Pemicu atas maraknya asimetri informasi yang dilakukan oleh para manajer adalah perkembangan dunia usaha yang semakin pesat sehingga menciptakan iklim persaingan yang semakin ketat dalam dunia usaha, dan pihak manajer dan pengelola perusahaan berupaya untuk mempertahankan agar perusahaan berjalan secara efektif serta efisien dan menimbulkan citra baik bagi perusahaan tersebut serta menciptakan daya tarik bagi investor.

Salah tolak ukur atas terjadinya Asimetri Informasi dapat dilihat dari *bid ask spread* atas nilai saham perusahaan tersebut karena *spread* yang terjadi dapat menunjukkan mengukur atas adanya asimetri informasi pada suatu perusahaan.

Asimetri informasi terjadi karena manajer lebih superior dalam menguasai informasi dibanding pihak lain (pemilik atau pemegang saham). Asimetri antara manajemen (*Agent*) dengan pemilik (*Principal*) memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunistis, yaitu memperoleh keuntungan pribadi. Dalam hal pelaporan keuangan, manajer dapat melakukan manajemen laba (*earnings management*) untuk menyesalkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan.

Asimetri informasi terjadi antara manajemen (*Agent*) dengan pemilik (*Principal*) memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunistis, yaitu demi memperoleh keuntungan pribadi (Ujiyanto, 2007). Asimetri informasi inilah yang kemudian menjadi pemicu munculnya praktik manajemen laba di perusahaan. Asimetri informasi ini dapat dikurangi dengan cara transparansi dalam penyampaian laporan keuangan terhadap *Principal*.

Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan tersebut dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan yang meyelaraskan berbagai kepentingan tersebut. Pertama, dengan memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (*managerik ownership*) (Jensen dan Meckling 1976 dalam Sami"ani 2008:20), sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer. Kedua, kepemilikan saham oleh investor institusional. Moh"d dkk (dalam Midiastuti dan Sami"ani 2008:20) menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba menjadi berkurang. Ketiga, melalui peran monitoring oleh dewan komisaris (*board of directors*). Beasley (1996) dalam Sami"ani (2008: 20) menemukan bahwa hubungan yang signifikan antara peran dewan komisaris dengan pelaporan keuangan. Mereka menemukan bahwa ukuran dan independensi dewan komisaris mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitor proses pelaporan keuangan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh (Ekowati.2010) yang menguji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pengambilan sampel yang lebih mendalam, yang mana pada penelitian sebelumnya mengambil variable nya hanya kinerja keuangan nya saja yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan dalam penelitian kali ini, penelitian

mengambil sampel variable nya juga pada kinerja keuangan dan asimetri informasi hanya pada perusahaan sub sektor perbankan dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan – perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu perusahaan perbankan. Sampel ini dipilih karena perusahaan perbankan adalah perusahaan yang mengalami pertumbuhan sangat signifikan.

Penelitian ini mengambil sampel tahun 2010– 2014 dikarenakan pada periode tersebut, perusahaan perbankan investornya mengalami kenaikan sangat tinggi sehingga berdampak pada persaingan yang semakin ketat pula antar perusahaan dalam menarik hati para investor, sehingga tinggi kemungkinan terjadinya asimetri informasi pada perusahaan tersebut.

Penelitian ini termotivasi oleh kondisi persaingan yang terjadi di perusahaan perbankan dan komponen dan adanya ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya maka peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan dan Asimetri Informasi dengan variable Intervening Pada Perusahaan Perbankan dan Komponen yang Terdaftar di BEI 2011 - 2014**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari fenomena dan permasalahan yang diungkapkan oleh peneliti, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pemicu atas maraknya asimetri informasi yang dilakukan oleh para manajer adalah perkembangan dunia usaha yang semakin pesat sehingga menciptakan iklim persaingan yang semakin ketat dalam dunia usaha
2. *Corporate governance* pada industri perbankan di negara berkembang seperti di Indonesia pada pasca krisis keuangan menjadi semakin penting
3. Ada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, yang melibatkan pelaporan keuangan (*financial reporting*) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi

1.3 Pembatasan masalah

Dari diidentifikasi masalah yang terpapar di atas diperoleh gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Pembatasan masalah dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan adalah Perusahaan Perbankan dan Komponen yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Data yang dipilih adalah data tahun 2010-2014
3. Penelitian ini menggunakan variable *Good Corporate Governance*, Kinerja Keuangan dan Asimetri Informasi

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang ditetapkan di atas, selanjutnya perumusan masalah dalam penelitian ini diajukan dengan pertanyaan penelitian (research questions) sebagai berikut :

1. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Asimetri Informasi?
2. Apakah Asimetri Informasi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan?
3. Apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan?
4. Apakah Asimetri Informasi merupakan variable intervening terhadap *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Asimetri Informasi?
2. Untuk mengetahui apakah Asimetri Informasi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan?
3. Untuk mengetahui apakah *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan?
4. Untuk mengetahui apakah Asimetri Informasi merupakan variable intervening terhadap *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan?

1.6 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagaiberikut :

1. Bagi para Investor

Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam menganalisa informasi yang keluar dari perusahaan..

2. Bagi para Emiten

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan *Good Corporate Governancy* yang ditentukan oleh perusahaan agar tingkat kepercayaan investor atas laporan keuangan perusahaan tetap terjaga.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi asimetri informasi.